

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI MALANG  
NOMOR:.....2019  
TENTANG  
PERUBAHAN RENCANA KERJA BADAN  
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH  
KABUPATEN MALANG TAHUN 2019

**PERUBAHAN RENCANA KERJA  
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN MALANG  
TAHUN 2019**

**BAB I  
PENDAHULUAN**

**1.1 Latar Belakang**

Dengan berlakunya Peraturan Bupati Malang Nomor 27 Tahun 2019 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019, maka dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2019 perlu untuk dilakukan penyesuaian serta menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah maupun perencanaan tahunan dengan menyesuaikan pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan. Untuk menyusun perubahan Rencana Kerja setiap Perangkat Daerah harus berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Seluruh dokumen perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan yang saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah adalah dokumen yang menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang merupakan penjabaran dari visi dan misi Pemerintah Daerah. Sebagai bahan masukan dalam penyusunan rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah adalah Rancangan Awal Rencana Strategis Perangkat Daerah. Selanjutnya setelah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

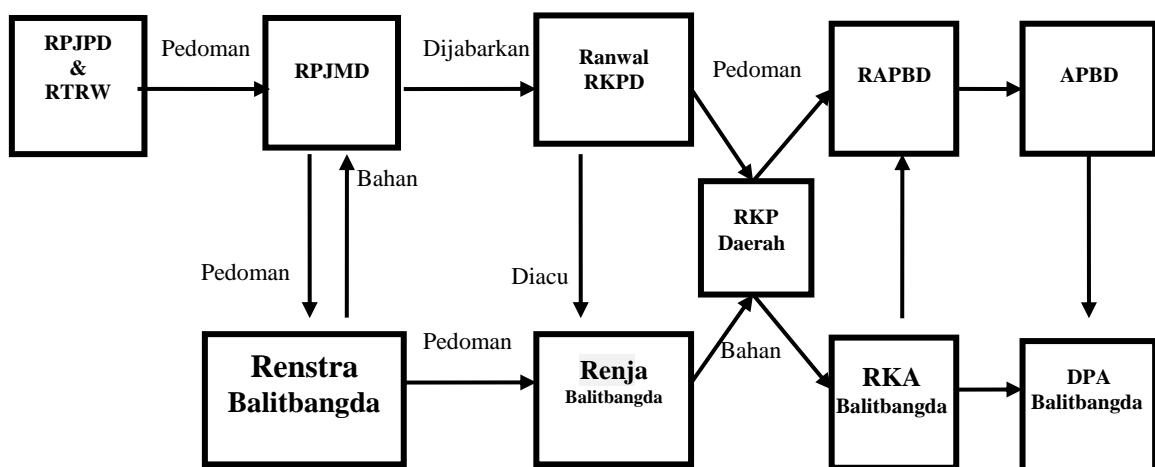
disahkan maka menjadi acuan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagai dokumen perencanaan tahunan.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) digunakan sebagai pedoman/acuan dalam penyusunan rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. Berkaitan dengan itu, maka RKPD merupakan pedoman awal untuk penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS), dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah tahun berkenaan.

Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan dokumen rencana pembangunan Perangkat Daerah yang berjangka waktu 1 (satu) tahun guna mengoperasionalkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang disertai dengan upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan masyarakat yang sudah dicapai oleh Perangkat Daerah, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Rencana Kerja merupakan penjabaran dari Rencana Strategis, dan dalam penyusunannya mengacu pada rancangan awal RKPD. Rencana Kerja juga sebagai bahan masukan untuk penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah. RKA dimaksud selanjutnya menjadi salah satu acuan penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah. Rencana Kerja juga perlu mengakomodir hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan, Forum Satuan Kerja Pemerintah Daerah, pokok-pokok pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan kebijakan Pemerintah Pusat/Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

## KETERKAITAN ANTAR DOKUMEN PERENCANAAN



Fokus/titik berat dari Rencana Kerja Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Malang disinkronkan dengan Prioritas Agenda Pembangunan Kabupaten Malang Tahun 2019, sebagaimana terdokumentasi dalam Perubahan RKPD Tahun 2019. Tema pembangunan dalam RKPD Kabupaten Malang Tahun 2019 adalah ***“Memacu Pertumbuhan Ekonomi Dalam Upaya Menurunkan Angka Kemiskinan Melalui Optimalisasi Potensi Pariwisata dan Peningkatan Daya Dukung Lingkungan Hidup”***.

Berbicara daya saing daerah merujuk pada Peraturan Bersama Menteri Riset dan Teknologi Nomor 3 Tahun 2012 dan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Dearah, diamanatkan didalamnya bahwa setiap daerah menetapkan kebijakan Penguatan Sistem Inovasi Dearah yang harus dicantumkan dalam sebuah dokumen Roadmap Penguatan Sistem Inovasi Dearah (SIDa). Kebijakan ini juga harus diintegrasikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Dearah dan Rencana Kerja Pemerintah Dearah.

Roadmap Penguatan Sistem Inovasi Dearah Kabupaten Malang adalah keseluruhan proses dalam satu sistem untuk menumbuhkembangkan inovasi yang dilakukan antar instansi pemerintah, pemerintah dearah, lembaga kelitbang, lembaga pendidikan, lembaga penunjang inovasi, dunia usaha dan masyarakat didaerah. Harapan adanya Roadmap dimaksud bisa mengakomodasi seluruh program dan kegiatan yang didanai oleh APBN atau APBD Kabupaten Malang atau lain-lain pendapatan yang sah sehingga

terwujud sinkronisasi, harmonisasi, serta sinergi didalam pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Malang.

## **1.2 Landasan Hukum**

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Malang Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pejabat Pemerintahan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pejabat Pemerintahan;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

14. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Malang Tahun 2005-2025;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

22. Peraturan Bupati Malang Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah;
23. Peraturan Bupati Malang Nomor 34 Tahun 2017 tentang Mekanisme Tahunan Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Malang;
24. Peraturan Bupati Malang Nomor 27 Tahun 2019 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019;
25. Peraturan Bupati Malang Nomor 111 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Malang Tahun 2019.

### **1.3 Maksud Dan Tujuan**

Maksud penyusunan Perubahan Rencana Kerja Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Malang Tahun 2019 adalah untuk menguraikan rencana perubahan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan sesuai dengan tugas dan fungsi, target yang akan dicapai, serta kerangka pendanaannya sebagai dasar pelaksanaan kegiatan pada tahun 2019.

Sedangkan tujuannya adalah:

1. sebagai pedoman atau acuan dalam melaksanakan program dan kegiatan yang akan dikerjakan dalam 1 (satu) tahun anggaran;
2. memberikan masukan utama dan mendasar bagi perencanaan ditingkat yang lebih tinggi;
3. menciptakan keterpaduan program dan kegiatan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah;
4. mengarahkan program dan kegiatan selama satu tahun dengan berpedoman pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Rencana Strategis Penelitian dan Pengembangan Daerah; dan
5. sebagai bahan evaluasi kegiatan tahun sebelumnya.

#### **1.4 Sistematika Penulisan**

Adapun sistematika penulisan Perubahan Rencana Kerja Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Malang Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

Bab I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

Bab II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2019

Bab III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

Bab IV PENUTUP

## **BAB II**

### **HASIL EVALUASI RENCANA KERJA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2019**

Pada tahun 2019 anggaran Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah sebesar Rp.3.045.991.000 yang terurai dalam 11 (sebelas) program dan 34 (tiga puluh empat) kegiatan. Target capaian kinerja untuk program Penelitian dan Pengembangan sebesar 79% dan sampai dengan triwulan II sudah terealisasi sebesar 37%. Untuk program Data dan Informasi, capaian kinerjanya ditargetkan sebesar 63%, dan terealisasi sebesar 20%. Jika dirata rata seluruh program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Malang sampai dengan triwulan dua tahun 2019 mencapai 30%.

Berdasarkan hasil evaluasi sampai dengan triwulan dua terhadap program maupun kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Malang ditemukan beberapa kegiatan yang membutuhkan tambahan alokasi anggaran dalam rangka untuk mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran yang akan dicapai pada tahun 2019.

Dalam upaya untuk mendukung pencapaian visi Kabupaten Malang yaitu Terwujudnya Kabupaten Malang yang MADEP MANTEB MANETEP dijabarkan dengan “Terwujudnya Kabupaten Malang yang Istiqomah, dan Memiliki Mental Bekerja Keras guna Mencapai Kemajuan Pembangunan yang Bermanfaat Nyata untuk Rakyat Berbasis Perdesaan”, khususnya pada Misi ke 2 yaitu “Memperluas inovasi dan reformasi birokrasi demi tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, akuntabel, dan demokratis berbasis teknologi informasi”, maka Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Malang yang memiliki fungsi menyusun kebijakan teknis, rencana, dan program kelitbangam di pemerintah kabupaten Malang melaksanakan pengkajian kebijakan dilingkup urusan pemerintahan daerah, melaksanakan fasilitasi dan mendorong terlaksananya inovasi daerah, melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan kelitbangam, melakukan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kelitbangam di pemerintahan kabupaten Malang, memastikan tersusunnya kebijakan dan atau regulasi yang berbasis hasil kelitbangam, memberikan rekomendasi regulasi dan kebijakan kepada Bupati dan perangkat daerah di lingkup pemerintahan kabupaten Malang, melaksanakan administrasi

kelitbangan, mengeluarkan rekomendasi dan melakukan pendampingan penelitian bagi warga negara asing untuk diterbitkannya izin penelitian oleh instansi yang berwenang.

Sehubungan dengan hal tersebut Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah harus ikut berperan dalam mewujudkan pemerintahan *good governance* (tata kelola pemerintahan yang baik), *clean government* (pemerintahan yang bersih), berkeadilan dan demokratis. Sedangkan berkaitan dengan prioritas pembangunan Kabupaten Malang, Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah perlu mendukung peningkatan kualitas pelayanan public melalui rekomendasi kelitbangan.

### **Permasalahan**

Berdasarkan Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), telah mengubah pola perencanaan yang ada, dimana Satuan Kerja Perangkat Daerah perlu menyusun perencanaan berdasarkan pagu indikatif dan produk perencanaan yang disusun merupakan hasil dari proses perencanaan yang telah memadukan proses politik, proses teknokratik, proses partisipatif dan proses *bottom-up* dan *top down*, yang disebut dengan istilah dari *shopping list* ke *working plant*.

Keterpaduan proses perencanaan ini diharapkan akan lebih banyak dapat menampung aspirasi masyarakat yang selama ini seolah-olah hanya sebagai pelengkap dalam proses perencanaan. Kecilnya realisasi dari usulan yang disampaikan masyarakat melalui musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) yang dapat tertampung dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah selama ini, memberikan indikasi terhadap kebenaran pernyataan diatas.

Untuk dapat mendukung kondisi yang diinginkan, kemampuan teknis perencanaan perlu ditingkatkan, sehingga dapat mendorong berkembangnya aspirasi masyarakat dan mengusulkannya dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang memang benar-benar dibutuhkan sesuai dengan arah kebijakan pembangunan yang sudah dicanangkan dalam RPJMD.

Kondisi tersebut diatas sangat erat kaitannya dengan keberadaan institusi penelitian/pengkajian dalam hal ini Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Malang yang membantu Bupati Malang dalam penyusunan dasar perumusan kebijakan dalam Perencanaan Pembangunan Daerah, sehingga semakin profesional dalam bidang

tugasnya. Untuk itu kualitas aparatur, sikap aparatur sangatlah menentukan dalam mewujudkan *good governance*.

Penyelenggaraan penelitian atau pengkajian dalam penyusunan dasar perumusan kebijakan pembangunan daerah di Kabupaten Malang tetap mengacu pada prioritas pembangunan Kabupaten Malang dengan indikator :

1. Peningkatan kualitas penyelenggaraan penelitian dan Terpenuhinya Sumber Daya manusia dibidang Penelitian dan Pengembangan.
2. Adanya dukungan sarana dan prasarana yang memadai.
3. Adanya jaringan kerjasama dan koordinasi yang baik dengan lembaga-lembaga litbang.
4. Adanya penghargaan terhadap hasil-hasil litbang.

Guna untuk mencapai sasaran dimaksud perlu diikuti oleh peningkatan kualitas produk penelitian/pengkajian. Beberapa hal yang masih menjadi penghambat permasalahan yang dihadapi Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Malang dalam peningkatan kualitas produk penelitian/pengkajian adalah sebagai berikut :

1. SDM yang belum berpengalaman dibidang penelitian dan pengembangan;
2. Keterbatasan anggaran;
3. Prasarana dan sarana yang belum memadai;
4. Belum adatenaga fungsional Penenliti;
5. Belum ada SDM yang memiliki sertifikat penelitian.

#### **Threats (tantangan) :**

1. Tingkat kesejahteraan mayoritas masayarakat yang berlatar belakang petani dan buruh masih rendah;
2. Masih adanya dualisme pelaksanaan penelitian dan pengembangan di instansi lain;
3. Sulitnya berkoordinasi dengan instansi lain dalam pelaksanaan bidang penelitian dan pengembangan;
4. Belum adanya pemahaman yang sama tentang peranan BALITBANGDA sebagai lembaga penghasil Rekomendasi Kebijakan;
5. Belum adanya penghargaan terhadap hasil-hasil Penelitian/Kajian.

#### **Opportunities (peluang) :**

1. Banyak permasalahan di bidang Pemerintahan, Ekonomi dan Keuangan, Pembangunan serta Politik dan Kemasyarakatan;

2. Pesatnya kemajuan teknologi informasi dan komunikasi;
3. Banyak Lembaga-lembaga Litbang (PTN/PTS, Balai-balai Penelitian, Lembaga-lembaga peneliti / Jasa Konsultan lainnya) yang bisa menjadi mitra kerja;
4. Tersedianya produk hasil penelitian lainnya yang dapat dipakai sebagai bahan acuan untuk pengumpulan data dan informasi yang valid;
5. Kondisi Kabupaten Malang yang kondusif.

Faktor-faktor kunci keberhasilan adalah topik atau bidang yang berkaitan secara luas dengan Misi, untuk mengarahkan perumusan tujuan organisasi. Faktor-faktor kunci keberhasilan memungkinkan manajemen untuk mengembangkan suatu rencana strategis yang lebih mudah untuk mengkomunikasikan dan menerapkannya. Faktor kunci keberhasilan berfungsi untuk lebih memfokuskan strategi organisasi dalam rangka mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien.

Dalam rangka mencapai tujuan organisasi yang efektif maka ditetapkan faktor-faktor kunci keberhasilannya sebagai berikut :

1. Terpenuhinya Sumber Daya manusia dibidang Penelitian dan Pengembangan;
2. Tercukupinya pendanaan untuk mendukung kegiatan Penelitian/kajian secara proporsional;
3. Adanya dukungan sarana dan prasarana yang memadai;
4. Memperluas jaringan kerjasama dan koordinasi yang baik dengan lembaga-lembaga penelitian;
5. Memperluas koordinasi dengan perangkat daerah guna merumuskan arah penelitian.

### **Sumber Daya Manusia Aparatur**

1. Mengikuti pendidikan lanjutan, kursus, pelatihan untuk meningkatkan proses dan hasil kegiatan.
2. Kriteria kelayakan SDM sesuai dengan Tupoksi dan kebutuhan untuk meningkatkan profesionalisme aparatur.
3. Kriteria kelayakan SDM sesuai dengan Tupoksi dan kebutuhan untuk seleksi rekrutmen aparatur yang sesuai dengan latar belakang profesionalisme.

**Sarana dan Prasarana**

1. Mengembangkan TI dan GIS serta perangkat keras beserta kelengkapannya guna mendukung manajemen pengelolaan penelitian dan pengembangan yang lebih baik dalam menunjang perumusan kebijakan dalam pelaksanaan pembangunan daerah.
2. Pemanfaatan sarana dan prasarana sesuai dengan tuntutan tugas.
3. Daftar kebutuhan dan pemeliharaan untuk melakukan pengadaan secara bertahap dan optimasi pemeliharaan.
4. Optimalisasi dan penambahan ruangan untuk memenuhi standard kelayakan kerja.

Adapun gambaran hasil evaluasi pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra SKPD sampai dengan Tahun 2019 terdapat pada tabel 2.1 berikut ini :

**Tabel 2.1**  
**Hasil Evaluasi Rencana Kerja Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Sampai Dengan Triwulan II**  
**Periode Pelaksanaan : 2019**

<b>No</b>	<b>Kode</b>	<b>Program/ Kegiatan</b>	<b>Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)</b>	<b>Target Renstra PD padaTahun 2021 (akhir periode Renstra PD)</b>	<b>Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun 2018</b>	<b>Target kinerja dan anggaran Renja PD Tahun Berjalan yang dievaluasi(Tahun 2019)</b>	<b>Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi(Tahun 2019)</b>	<b>Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja yang dievaluasi Tahun 2019 (%)</b>	<b>Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2019(Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2019)</b>	<b>Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2019(%)</b>	<b>Ketera ngan</b>								
												<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9 = 8/7x100</b>	<b>10 = 6 + 8</b>	<b>11=10/5 x100</b>	
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>K</b>	<b>Rp</b>	<b>K</b>	<b>Rp</b>	<b>K</b>	<b>Rp</b>	<b>K</b>	<b>Rp</b>	<b>K</b>	<b>Rp</b>	<b>K</b>	<b>Rp</b>	<b>K</b>	<b>Rp</b>	<b>K</b>	<b>Rp</b>
				<b>16.566.504.875,00</b>		<b>5.004.578.600,00</b>		<b>3.045.991.000,00</b>		<b>1.000.073.250,00</b>		<b>23,7</b>	<b>32,83</b>		<b>6.004.651.850,00</b>	<b>35,39</b>	<b>36,25</b>		
1	4.404.33.01	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)</b>	100%	<b>2.708.704.045,00</b>	100%	<b>819.541.100,00</b>	100%	<b>713.450.900,00</b>	0%	<b>295.662.950,00</b>	0	<b>41,44</b>	0%	<b>1.115.204.050,00</b>	0	<b>41,57</b>		
	4.404.33.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah registrasi surat masuk dan surat keluar (buah)	8500 buah	27.630.000,00	1700 buah	6.000.000,00	12 buah	6.000.000,00	5 buah	2.400.000,00	41,7	40	1705 buah	8.400.000,00	20,6	30,4	-	
	4.404.33.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Listrik, Air Minum/Air Bersih, Telekomunikasi dan Internet (Bulan)	60 Bulan	23.421.200,00	12 Bulan	3.960.000,00	12 Bulan	2.400.000,00	5 Bulan	295.150,00	41,7	12,3	17 Bulan	4.255.150,00	28,33	18,17	-	
	4.404.33.01.03	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan (OB)	70 OB	593.670.600,00	12 OB	113.430.000,00	12 OB	253.545.000,00	5 OB	94.265.000,00	41,7	37,18	17 OB	207.695.000,00	24,29	34,98		
	4.404.33.01.04	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah petugas kebersihan (OB)	10 OB	117.709.600,00	5 OB	37.200.000,00	12 OB	21.600.000,00	5 OB	9.000.000,00	41,7	41,67	10 OB	46.200.000,00	100	39,25	-	
	4.404.33.01.05	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (Jenis)	400 jenis	227.801.700,00	80 jenis	71.772.600,00	80 jenis	42.395.200,00	37 jenis	21.684.500,00	46,3	51,15	117 jenis	93.457.100,00	29,25	41,03		
	4.404.33.01.06	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan yang disediakan (Jenis)	35 jenis	306.004.000,00	7 jenis	98.448.600,00	7 jenis	53.463.200,00	4 jenis	21.222.400,00	57,1	39,7	11 jenis	119.671.000,00	31,43	39,11		
	4.404.33.01.07	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan (jenis)	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan (jenis)	15 eksemplar	30.021.500,00	48 eksemplar	10.000.000,00	24 eksemplar	5.000.000,00	12 eksemplar	2.120.200,00	50	42,4	60 eksemplar	12.120.200,00	400	40,37		
	4.404.33.01.08	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman harian Pegawai, Rapat, dan tamu yang disediakan (HOK)	3240 Pack	265.477.800,00	1047 Pack	85.735.000,00	360 Pack	49.252.500,00	260 Pack	17.954.500,00	72,2	36,45	1307 Pack	103.689.500,00	40,34	39,06		
	4.404.33.01.09	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke luar daerah (HOK)	448 OHK	687.189.500,00	180 OHK	229.574.900,00	119 OHK	145.800.000,00	19 OHK	72.580.200,00	16	49,78	199 OHK	302.155.100,00	44,42	43,97	-	
	4.404.33.01.10	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke dalam daerah (HOK)	729 OHK	404.027.700,00	283 OHK	158.275.000,00	392 OHK	128.850.000,00	182 OHK	51.850.000,00	46,4	40,24	465 OHK	210.125.000,00	63,79	52,01		
	4.404.33.01.11	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan kantor	36 Jenis komponen	25.750.445,00	9 Jenis komponen	5.145.000,00	9 Jenis komponen	5.145.000,00	5 Jenis komponen	2.291.000,00	55,6	44,53	14 Jenis komponen	7.436.000,00	38,89	28,88		

No	Kode	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD padaTahun 2021 (akhir periode Renstra PD)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun 2018	Target kinerja dan anggaran Renja PD Tahun Berjalan yang dievaluasi(Tahun 2019)	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi(Tahun 2019)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja yang dievaluasi Tahun 2019 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2019(Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2019(%)		Ketera ngan										
									5		6		7		8		9 = 8/7x100		10 = 6 + 8		11=10/5 x100		
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4																				12
2	4.404.33.02	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)	100%	685.715.400,00	100%	284.773.500,00	100%	158.963.600,00	0%	25.261.800,00	0	15,89	0%	310.035.300,00	0	45,21						
	4.404.33.02.01	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	1 jenis	166.230.200,00	5 jenis	171.896.800,00	1 jenis	23.408.700,00	0 jenis	13.109.000,00	0	56	0 jenis	185.005.800,00	0	111,29						
	4.404.33.02.02	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua yang dipelihara rutin dan berkala (Unit)	24 Unit	179.145.200,00	5 Unit	55.494.200,00	5 Unit	29.956.400,00	4 Unit	9.925.800,00	80	33,13	9 Unit	65.420.000,00	37,5	36,52						
	4.404.33.02.03	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan (jenis)	36 Unit	259.531.500,00	16 Unit	57.382.500,00	65 Unit	92.100.000,00	0 Unit	0	0	0	16 Unit	57.382.500,00	44,4	22,11						
	4.404.33.02.04	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	27 Unit	80.808.500,00	0 Unit	0	27 Unit	13.498.500,00	11 Unit	2.227.000,00	40,7	16,5	11 Unit	2.227.000,00	40,7	2,76						
3	4.404.33.03	<b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b>	Persentase Penunjang Kerja Aparatur (%)	100%	47.040.000,00	100%	0	100%	20.400.000,00	0%	10.000.000,00	0	49,02	0%	10.000.000,00	0	21,26						
	4.404.33.03.01	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Jumlah penyediaan Pakaian Olahraga/Batik (Stel)	136 Orang	47.040.000,00	0 Orang	0	80 Orang	20.400.000,00	40 Orang	10.000.000,00	50	49,02	40 Orang	10.000.000,00	29,4	21,26						
4	4.404.33.04	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>	Persentase Peningkatan Kapasitas Pegawai di Perangkat Daerah (%)	100%	539.391.500,00	100%	34.120.000,00	100%	58.745.000,00	0%	33.840.000,00	0	57,6	0%	67.960.000,00	0	12,6						
	4.404.33.04.01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Pegawai yang mengikuti pelatihan ( orang)	165 OHK	539.391.500,00	21 OHK	34.120.000,00	4 OHK	58.745.000,00	1 OHK	33.840.000,00	25	57,6	22 OHK	67.960.000,00	13,3	12,6						
5	4.404.33.05	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>	Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu (%)	100%	269.618.900,00	100%	51.874.100,00	100%	24.935.400,00	0%	8.281.500,00	0	33,21	0%	60.155.600,00	0	22,31						
	4.404.33.05.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja (LJK-IP/Profile Kinerja PD/Survei Kepuasan Masyarakat) (Buku)	35 Laporan	198.670.800,00	7 Laporan	35.235.600,00	7 Laporan	16.012.600,00	7 Laporan	8.281.500,00	100	51,72	14 Laporan	43.517.100,00	40	21,9	-					
	4.404.33.05.02	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Jumlah dokumen laporan keuangan semester I dan semester II (Buku)	10 Dokumen	11.160.300,00	2 Dokumen	3.648.700,00	2 Dokumen	1.959.400,00	0 Dokumen	0	0	0	2 Dokumen	3.648.700,00	20	32,69						
	4.404.33.05.03	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir (Buku)	15 Dokumen	59.787.800,00	1 Dokumen	12.989.800,00	1 Dokumen	6.963.400,00	0 Dokumen	0	0	0	1 Dokumen	12.989.800,00	6,67	21,73						

No	Kode	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD padaTahun 2021 (akhir periode Renstra PD)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun 2018	Target kinerja dan anggaran Renja PD Tahun Berjalan yang dievaluasi(Tahun 2019)	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi(Tahun 2019)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja yang dievaluasi Tahun 2019 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2019(Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2019(%)		Ketera ngan				
									9 = 8/7x100	10 = 6 + 8	11=10/5 x100	12					
K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
6	4.404.33.06	<b>PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BIDANG PEMBANGUNAN</b>	Persentase hasil kegiatan kelitbang yang sesuai dengan strategi pembangunan Pemkab Malang	81%	2.744.853.000,00	79%	183.000.000,00	79%	368.023.000,00	25%	134.554.500,00	31,65	36,56	25%	317.554.500,00	30,88	11,57
	4.404.33.06.01	Kegiatan penelitian/kajian/stu di/analisa dan terapan bidang Lingkungan Hidup	1. Jumlah Usulan Judul penelitian 2. Jumlah Dokumen Hasil Kajian Penelitian/Kajian/Studi /Analisa 3. Jumlah Dokumen Rekomendasi Hasil Penelitian dan Pengembangan 4. Jumlah Modul Terapan 5. Jumlah Naskah Jurnal Hasil Kegiatan	13 doku men	1.026.962.500,00	1 doku men	60.000.000,00	1 doku men	96.112.000,00	0 doku men	39.203.000,00	0	40,79	1 doku men	99.203.000,00	7,69	9,66
	4.404.33.06.02	Kegiatan penelitian/kajian/stu di/analisa dan terapan bidang Teknologi Tepat Guna	1. Jumlah Usulan Judul penelitian 2. Jumlah Dokumen Hasil Kajian Penelitian/Kajian/Studi /Analisa 3. Jumlah Dokumen Rekomendasi Hasil Penelitian dan Pengembangan 4. Jumlah Modul Terapan 5. Jumlah Naskah Jurnal Hasil Kegiatan	13 doku men	1.257.260.000,00	1 doku men	60.000.000,00	1 doku men	176.280.000,00	0 doku men	56.542.000,00	0	32,08	1 doku men	116.542.000,00	7,69	9,27
	4.404.33.06.03	Kegiatan penelitian/kajian/stu di/analisa dan terapan bidang Pengembangan Kawasan	1. Jumlah Usulan Judul penelitian 2. Jumlah Dokumen Hasil Kajian Penelitian/Kajian/Studi /Analisa 3. Jumlah Dokumen Rekomendasi Hasil Penelitian dan Pengembangan 4. Jumlah Modul Terapan 5. Jumlah Naskah Jurnal Hasil Kegiatan	12 Doku men	460.640.500,00	1 Doku men	63.000.000,00	1 Doku men	95.631.000,00	0 Doku men	38.809.500,00	0	40,58	1 Doku men	101.809.500,00	8,33	22,1
7	4.404.33.07	<b>PROGRAM PERUMUSAN, PENGOLAHAN DAN PENYUSUNAN INFORMASI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN</b>	Prosentase Informasi Penelitian dan Pengembangan yang tersusun	50%	1.383.413.550,00	46%	452.312.000,00	46%	275.582.100,00	0%	68.540.200,00	0	24,87	0%	520.852.200,00	0	37,65
	4.404.33.07.01	Pengumpulan, Pengolahan dan Penyusunan Informasi Penelitian dan Pengembangan	Jumlah Dokumen Informasi Penelitian dan Pengembangan (Jurnal,	9 Doku men	1.383.413.550,00	1 Doku men	452.312.000,00	1 Doku men	275.582.100,00	0 Doku men	68.540.200,00	0	24,87	1 Doku men	520.852.200,00	11,1	37,65
8	4.404.33.08	<b>PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BIDANG SOSIAL DAN KEMASYARAKATAN</b>	Persentase hasil kegiatan kelitbang yang sesuai dengan strategi pembangunan Pemkab Malang	81%	2.288.229.000,00	79%	833.000.000,00	79%	359.000.000,00	8.7 %	132.515.000,00	11	36,91	8.7 %	965.515.000,00	10,7	42,19

No	Kode	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD padaTahun 2021 (akhir periode Renstra PD)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun 2018	Target kinerja dan anggaran Renja PD Tahun Berjalan yang dievaluasi(Tahun 2019)	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi(Tahun 2019)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja yang dievaluasi Tahun 2019 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2019(Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2019)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2019(%)	Ketera ngan							
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 8/7x100	10 = 6 + 8	11=10/5 x100	12							
	4.404.33.08.01	Kegiatan penelitian/kajian/studi/analisa dan terapan bidang Sosial Budaya	1. Jumlah Usulan Judul penelitian 2. Jumlah Dokumen Hasil Kajian Penelitian/Kajian/Studi /Analisa 3. Jumlah Modul Terapan 4. Jumlah Naskah Jurnal Hasil Kegiatan	13 doku men	860.373.000,00	3 doku men	362.750.000,00	1 doku men	98.000.000,00	0 doku men	37.930.000,00	0	38,7	3 doku men	400.680.000,00	23,08	46,57	-
	4.404.33.08.02	Kegiatan penelitian/kajian/studi/analisa dan terapan bidang Sosial Politik	1. Jumlah Usulan Judul penelitian 2. Jumlah Dokumen Hasil Kajian Penelitian/Kajian/Studi /Analisa 3. Jumlah Modul Terapan 4. Jumlah Naskah Jurnal Hasil Kegiatan	13 doku men	964.915.000,00	3 doku men	407.750.000,00	1 doku men	93.000.000,00	0 doku men	36.290.000,00	0	39,02	3 doku men	444.040.000,00	23,08	46,02	
	4.404.33.08.03	Kegiatan penelitian/kajian/studi/analisa dan terapan bidang Kemasyarakatan	1. Jumlah Usulan Judul penelitian 2. Jumlah Dokumen Hasil Kajian Penelitian/Kajian/Studi /Analisa 3. Jumlah Modul Terapan 4. Jumlah Naskah Jurnal Hasil Kegiatan	12 doku men	462.941.000,00	1 doku men	62.500.000,00	1 doku men	168.000.000,00	0 doku men	58.295.000,00	0	34,7	1 doku men	120.795.000,00	8,33	26,09	
9	4.404.33.09	<b>PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BIDANG EKONOMI, INVESTASI DAN KEUANGAN</b>	<b>Percentase hasil kegiatan kelitbang yang sesuai dengan strategi pembangunan Pemkab Malang</b>	81%	<b>2.696.229.000,00</b>	79%	<b>1.038.140.000,00</b>	79%	<b>497.500.000,00</b>	25%	<b>137.698.800,00</b>	31,7	<b>27,68</b>	25%	<b>1.175.838.800,00</b>	30,9	<b>43,61</b>	
	4.404.33.09.01	Kegiatan penelitian/kajian/studi/analisa dan terapan bidang Ekonomi	1. Jumlah Usulan Judul penelitian 2. Jumlah Dokumen Hasil Kajian Penelitian/Kajian/Studi /Analisa 3. Jumlah Modul Terapan 4. Jumlah Naskah Jurnal Hasil Kegiatan	13 doku men	1.268.829.800,00	3 doku men	566.537.800,00	1 doku men	98.000.000,00	0 doku men	38.886.000,00	0	39,68	3 doku men	605.423.800,00	23,08	47,72	
	4.404.33.09.02	Kegiatan penelitian/kajian/studi/analisa dan terapan bidang keuangan	1. Jumlah Usulan Judul penelitian 2. Jumlah Dokumen Hasil Kajian Penelitian/Kajian/Studi /Analisa 3. Jumlah Modul Terapan 4. Jumlah Naskah Jurnal Hasil Kegiatan	13 doku men	964.100.400,00	3 doku men	409.943.000,00	1 doku men	299.500.000,00	0 doku men	56.523.700,00	0	18,87	3 doku men	466.466.700,00	23,08	48,38	
	4.404.33.09.03	Kegiatan penelitian/kajian/studi/analisa dan terapan bidang investasi	1. Jumlah Usulan Judul penelitian 2. Jumlah Dokumen Hasil Kajian Penelitian/Kajian/Studi /Analisa 3. Jumlah Modul Terapan 4. Jumlah Naskah Jurnal Hasil Kegiatan	12 doku men	463.298.800,00	1 doku men	61.659.200,00	1 doku men	100.000.000,00	0 doku men	42.289.100,00	0	42,29	1 doku men	103.948.300,00	8,33	22,44	-

No	Kode	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD padaTahun 2021 (akhir periode Renstra PD)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun 2018	Target kinerja dan anggaran Renja PD Tahun Berjalan yang dievaluasi(Tahun 2019)	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi(Tahun 2019)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja yang dievaluasi Tahun 2019 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2019(Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2019)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2019(%)	Ketera ngan							
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 8/7x100	10 = 6 + 8	11=10/5 x100	12							
K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp							
10	4.404.33.10	<b>PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BIDANG PEMERINTAHAN</b>	Persentase hasil kegiatan kelitbang yang sesuai dengan strategi pembangunan Pemkab Malang	81%	2.626.324.480,00	79%	1.000.374.000,00	79%	459.500.000,00	25%	145.077.500,00	31,7	31,57	25%	1.145.451.500,00	30,9	43,61	
	4.404.33.10.01	Kegiatan penelitian/kajian/stu di/analisa dan terapan bidang pemerintahan umum dan desa	1. Jumlah Usulan Judul penelitian 2. Jumlah Dokumen Hasil Kajian Penelitian/Kajian/Studi /Analisa 3. Jumlah Modul Terapan 4. Jumlah Naskah Jurnal Hasil Kegiatan	13 doku men	964.551.000,00	3 doku men	411.559.000,00	1 doku men	170.000.000,00	0 doku men	32.154.000,00	0	18,91	3 doku men	443.713.000,00	23,08	46	
	4.404.33.10.02	Kegiatan penelitian/kajian/stu di/analisa dan terapan bidang aparatur pemerintah dan pelayanan publik	1. Jumlah Usulan Judul penelitian 2. Jumlah Dokumen Hasil Kajian Penelitian/Kajian/Studi /Analisa 3. Jumlah Modul Terapan 4. Jumlah Naskah Jurnal Hasil Kegiatan	13 doku men	1.200.785.480,00	3 doku men	530.517.000,00	1 doku men	184.500.000,00	0 doku men	72.727.500,00	0	39,42	3 doku men	603.244.500,00	23,08	50,24	
	4.404.33.10.03	Kegiatan penelitian/kajian/stu di/analisa dan terapan bidang otonomi daerah dan kerjasama	1. Jumlah Usulan Judul penelitian 2. Jumlah Dokumen Hasil Kajian Penelitian/Kajian/Studi /Analisa 3. Jumlah Modul Terapan 4. Jumlah Naskah Jurnal Hasil Kegiatan	12 doku men	460.988.000,00	1 doku men	58.298.000,00	1 doku men	105.000.000,00	0 doku men	40.196.000,00	0	38,28	1 doku men	98.494.000,00	8,33	21,37	
11	4.404.33.11	<b>PROGRAM PENINGKATAN INOVASI DAERAH</b>	<b>Percentase Program/Kegiatan Inovasi Daerah</b>	81%	<b>576.986.000,00</b>	79%	<b>307.443.900,00</b>	79%	<b>109.891.000,00</b>	0%	<b>8.641.000,00</b>	0	<b>7,86</b>	0%	<b>316.084.900,00</b>	0	<b>54,78</b>	
	4.404.33.11.01	Penyusunan Dokumen Roadmap SIDa (Sistem Inovasi Daerah)	Jumlah Dokumen Roadmap SIDa yang tersusun	5 doku men	576.986.000,00	1 doku men	307.443.900,00	1 doku men	109.891.000,00	0 doku men	8.641.000,00	0	7,86	1 doku men	316.084.900,00	20	54,78	
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan Total (%)</b>										<b>23,7</b>	<b>33,98</b>			<b>35,6</b>	<b>32,6</b>			
<b>Predikat Kinerja Kegiatan Total</b>										<b>SR</b>	<b>SR</b>			<b>SR</b>	<b>SR</b>			

Catatan penting :

- Pada tabel 2.1 diatas, terlihat bahwa program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Program Peningkatan sarana dan prasarana Aparatur, program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan, merupakan program kelitbangun pendukung yang perlu mendapatkan tambahan volume kegiatan dalam rangka untuk mendukung program dan kegiatan kelitbangun utama.
- Pelaksanaan program penelitian dan pengembangan tahun 2019 yang merupakan program kelitbangun utama target kinerjanya sebesar 79% sampai dengan tribulan 2 (dua) kinerjanya sudah mencapai 30%.
- Apabila mengacu pada tugas pokok dan fungsi Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah, yang mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan kegiatan kelitbangun utama dan kelitbangun pendukung sebagaimana diamanatkan dalam Permendagri nomor 17 tahun 2016 tentang kelitbangun maka Program Penelitian dan Pengembangan yang harus dilaksanakan terdiri dari 7 (tujuh) kelitbangun utama yakni : penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasaan, penerapan, pengoperasian dan evaluasi kebijakan. Sehingga program dan kegiatan yang dilaksanakan perlu dilakukan Penyesuaian dengan tetap mempertimbangkan ketersediaan Sumber daya aparatur, kebutuhan riil serta sumberdaya anggaran yang tersedia.

**BAB III**  
**RENCANA KERJA DAN PENDANAAN**  
**BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**

Penyusunan Rencana Kerja Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Malang Tahun 2019, mengacu pada 2 (dua) urusan dari 34 (tiga puluh empat) urusan yang direncanakan pada APBD Kabupaten Malang. Urusan tersebut adalah Urusan Perencanaan Pembangunan dan urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian. Adapun program nasional yang menjadi acuan adalah Program Pengembangan Data/Informasi, Program Perencanaan Pembangunan, Program Penelitian dan Pengembangan.

Selain hal tersebut di atas, kita diwajibkan untuk merencanakan kegiatan yang responsif gender, sebagai syarat pemenuhan anggaran yang berbasis Pengarusutamaan Gender (PUG). PUG merupakan sebuah strategi, bukan tujuan. Strategi ini dirumuskan agar desain, implementasi, monitoring, dan evaluasi kebijakan dan program di seluruh ranah politik, ekonomi, sosial, dan budaya dapat terwujud. Sedangkan tujuan utamanya adalah mewujudkan keadilan gender. Dengan PUG maka semua program pembangunan dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan kesempatan dan akses perempuan terhadap program pembangunan, serta dengan adanya kendali dan manfaat untuk perempuan.

Di Indonesia, secara resmi PUG diadopsi menjadi strategi pembangunan bidang pemberdayaan perempuan melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional. Dalam inpres tersebut dinyatakan tujuan PUG adalah terselenggaranya perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional yang berperspektif gender. Dan strategi PUG ditempuh dalam rangka mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Ruang lingkup PUG dalam Inpres Nomor 9 Tahun 2000 meliputi:

1. Perencanaan, termasuk di dalamnya perencanaan yang responsif gender/gender budgeting;
2. Pelaksanaan;
3. Pemantauan dan Evaluasi.

Untuk mempercepat pelaksanaan PUG, juga telah dikeluarkan Surat Edaran tentang Strategi Nasional Percepatan Pengarusutamaan Gender melalui Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender pada tanggal 1 November 2012. Surat Edaran ini dikeluarkan secara bersama-sama oleh Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Surat edaran ini ditujukan kepada para menteri Kabinet Indonesia Bersatu II, Jaksa Agung RI, Kepala Kepolisian RI, para kepala lembaga pemerintah non-kementerian, para pimpinan kesekretariatan lembaga negara, para gubernur, dan para bupati/walikota.

Berdasar hal tersebut di atas, Perencanaan dan penganggaran pada Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Malang sudah sangat responsif gender, ditunjukkan dalam implementasi kegiatan teknis dari 12 (dua belas) kegiatan, yang responsif gender ada 5 (lima) kegiatan atau 41,67 persen yang meliputi kegiatan Pengembangan Bidang Ekonomi; Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur, Penelitian/Kajian/Studi/Analisa Bidang Pengembangan Kawasan;Penelitian/kajian/Studi/Analisa Bidang Sosial; serta Penelitian/Kajian/Studi/Analisa Bidang Pemerintahan.

Kegiatan yang responsif gender tersebut diuraikan dalam Kerangka Acuan Kerja/Term of Reference pada Gender Budget Statement (GBS) pada setiap tahun anggaran Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Malang.

Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi faktor-faktor kunci keberhasilan (*Critical Success Factor*) yang ditetapkan setelah penetapan visi dan misi. Penetapan tujuan akan mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan Visi dan Misi. Sedangkan sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan terfokus yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai.

Badan penelitian dan Pengembangan Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga teknis daerah yang melaksanakan penelitian dan pengembangan guna membantu Bupati Malang dalam menyusun dan merumuskan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan daerah dituntut untuk menghasilkan produk-produk yang berkualitas terutama produk berupa rencana pembangunan daerah.

Adapun tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam Renja Badan penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Malang Tahun 2019, sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis Tahun 2016 – 2021 adalah sebagai berikut :

### **Tujuan**

Berdasarkan dari isu aktual, tugas pokok dan fungsi Badan penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Malang sebagaimana telah dikemukakan diatas, maka dapat dirumuskan tujuan yang ingin dicapai sebagai berikut:

Tujuan dalam rangka mewujudkan Misi kedua RPJMD Kabupaten Malang 2016-2021 yaitu memperluas inovasi dan reformasi birokrasi demi tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, akuntabel dan demokratis berbasis teknologi informasi adalah : Mewujudkan hasil kelitbangam yang bermanfaat untuk peningkatan kinerja pemerintahan.

### **Sasaran**

Sasaran adalah suatu hasil yang dapat dicapai dalam kurun waktu lima tahun, untuk menghasilkan pedoman penyusunan rencana kegiatan danalokasi penempatan sumber daya yang tersedia secara efektif dan efisien.

Dalam menjabarkan sasaran harus memiliki prinsip antara lain :

- a. Merupakan hasil yang dapat dicapai;
- b. Menantang tapi logis dan realistik;
- c. Memberikan kontribusi yang tinggi terhadap pencapaian tujuan;
- d. Sesuai wewenang dan tanggung jawab;
- e. SMART :

(S) *Spesific* : bersifat khusus/khas dan simple/sederhana

(M) *Measurable* : dapat diukur

(A) *Attaible/Achievable* : dapat dijadikan/dikerjakan

- |                   |                             |
|-------------------|-----------------------------|
| (R) Rasional      | : bersifat logis/masuk akal |
| (T) Time Releated | : dimensi waktunya jelas    |

Berdasarkan prinsip penetapan sasaran tersebut, maka dapat dijabarkan sasaran Badan penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Malang adalah Meningkatnya hasil kajian yang berhasil dipublikasikan dengan indikator sasaran persentase hasil kajian yang berhasil dipublikasikan di jurnal ilmiah bereputasi.

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mencapai hasil yang dilaksanakan oleh satu dan beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu.

Badan penelitian dan Pengembangan Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga teknis daerah yang melaksanakan penyelenggaraan penelitian/pengkajian dalam penyusunan dasar perumusan kebijakan pembangunan daerah di Kabupaten Malang dituntut untuk menghasilkan produk-produk yang berkualitas terutama produk berupa hasil penelitian/kajian/analisa dan terapan.

Apabila dikaitkan dengan pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Malang, pada dasarnya kegiatan Badan penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Malang adalah sebagai “*pengkaji/peneliti*” yang akan menghasilkan rekomendasi terhadap program pembangunan di Kabupaten Malang.

Sejalan dengan Visi Kabupaten Malang tahun 2016 - 2021 yaitu “*Terwujudnya Kabupaten Malang yang MADEP MANTEB MANETEP*” sebagai salah satu upaya pencapaian target yang ditetapkan dalam RKPD Tahun 2019, maka program dan kegiatan yang dirancang oleh Badan penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Malang tahun 2019 terdiri dari :

Program :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur;
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan;
6. Program Perumusan, Pengolahan dan Penyusunan Informasi Penelitian dan Pengembangan;

7. Program Penelitian dan Pengembangan bidang Pembangunan;
8. Program Penelitian dan Pengembangan bidang Sosial dan Kemasyarakatan;
9. Program Penelitian dan Pengembangan bidang Ekonomi, Investasi dan Keuangan;
10. Program Penelitian dan Pengembangan bidang Pemerintahan;
11. Program Peningkatan Inovasi Daerah.

Kegiatan :

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
2. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor;
3. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
4. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan;
5. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor;
6. Penyediaan Alat Tulis Kantor;
7. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan;
8. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan;
9. Penyediaan Makanan dan Minuman;
10. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah;
11. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah;
12. Pengadaan peralatan gedung kantor;
13. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor;
14. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional;
15. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor;
16. Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu
17. Pendidikan dan Pelatihan Formal;
18. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;
19. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran;
20. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun;
21. Pengumpulan pengolahan dan Penyusunan Data Informasi Penelitian dan pengembangan;
22. Penelitian/Kajian/Studi/Analisa dan Terapan Bidang Pembangunan dan Lingkungan Hidup;
23. Penelitian/Kajian/Studi/Analisa dan Terapan Bidang Teknologi Tepat Guna;
24. Penelitian/Kajian/Studi/Analisa dan Terapan Bidang Pengembangan Kawasan;

25. Penelitian/Kajian/Studi/Analisa dan Terapan Bidang Sosial Budaya;
26. Penelitian/Kajian/Studi/Analisa dan Terapan Analisa bidang Sosial Politik;
27. Penelitian/Kajian/Studi/Analisa dan Terapan Analisa bidang Kemasyarakatan;
28. Penelitian/Kajian/Studi/Analisa dan Terapan Analisa bidang ekonomi;
29. Penelitian/Kajian/Studi/Analisa dan Terapan Analisa bidang Keuangan;
30. Penelitian/Kajian/Studi/Analisa dan Terapan Analisa bidang investasi;
31. Penelitian/Kajian/Studi/Analisa dan Terapan Bidang pemerintahan umum dan desa;
32. Penelitian/Kajian/Studi/Analisa dan Terapan bidang Aparatur Pemerintah dan Pelayanan Publik;
33. Penelitian/Kajian/Studi/Analisa dan Terapan bidang Otonomi Daerah dan Kerjasama;
34. Penyusunan Dokumen Roadmap SIDa (Sistem Inovasi Daerah).

Untuk lebih jelasnya Rumusan Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Badan penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Malang ditahun 2019 dapat dilihat pada tabel 3.1 dibawah ini.

**Tabel 3.1**  
**RUMUSAN RENCANA PROGRAM/KEGIATAN TAHUN 2019**  
**BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN MALANG**

<b>KODE</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN</b>	<b>INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)</b>	<b>PAGU BELANJA LANGSUNG</b>					
			<b>SEBELUM PERUBAHAN</b>		<b>SETELAH PERUBAHAN</b>		<b>SELISIH (+/-)</b>	<b>LOKASI</b>
			<b>TARGET CAPAIAN KINERJA</b>	<b>PAGU (Rp.)</b>	<b>TARGET CAPAIAN KINERJA</b>	<b>PAGU (Rp.)</b>		
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>
				<b>3.045.991.000,00</b>		<b>3.262.991.000,00</b>	<b>217.000.000,00</b>	
<b>4</b>	<b>FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN</b>			<b>3.045.991.000,00</b>		<b>3.262.991.000,00</b>	<b>217.000.000,00</b>	
<b>4.404</b>	<b>PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN</b>			<b>3.045.991.000,00</b>		<b>3.262.991.000,00</b>	<b>217.000.000,00</b>	
<b>4.404.33</b>	<b>BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN</b>			<b>3.045.991.000,00</b>		<b>3.262.991.000,00</b>	<b>217.000.000,00</b>	
<b>4.404.33.01</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)</b>	<b>100 %`</b>	<b>713.450.900,00</b>	<b>100 %`</b>	<b>718.217.900,00</b>	<b>4.767.000,00</b>	
4.404.33.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah registrasi surat masuk dan surat keluar (buah)	12bulan	6.000.000,00	12bulan	6.000.000,00	0	Kab. Malang
4.404.33.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Listrik, Air Minum/Air Bersih, Telekomunikasi dan Internet (Bulan)	12bulan	2.400.000,00	12bulan	2.400.000,00	0	Kab. Malang
4.404.33.01.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan (OB)	11 bulan	253.545.000,00	12 bulan	258.312.000,00	4.767.000,00	Kab. Malang
4.404.33.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah petugas kebersihan (OB)	12bulan	21.600.000,00	12bulan	21.600.000,00	0	Kab. Malang
4.404.33.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (Jenis)	80Jenis	42.395.200,00	80Jenis	42.395.200,00	0	Kab. Malang
4.404.33.01.11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan yang disediakan (Jenis)	7Jenis	53.463.200,00	7Jenis	53.463.200,00	0	Kab. Malang
4.404.33.01.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan (jenis)	24 eksemplar	5.000.000,00	24 eksemplar	5.000.000,00	0	Kab. Malang
4.404.33.01.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman harian Pegawai, Rapat, dan tamu yang disediakan (HOK)	360 Pack	49.252.500,00	360 Pack	49.252.500,00	0	Kab. Malang
4.404.33.01.18	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke luar daerah (HOK)	90 OK	145.800.000,00	90 OK	145.800.000,00	0	Kab. Malang
4.404.33.01.19	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke dalam daerah (HOK)	65 OK	128.850.000,00	65 OK	128.850.000,00	0	Kab. Malang
4.404.33.01.20	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan kantor	9 Jenis komponen	5.145.000,00	9 Jenis komponen	5.145.000,00	0	Balitbangda
<b>4.404.33.02</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN</b>	<b>Persentase Pemenuhan Sarana dan</b>	<b>100%</b>	<b>158.963.600,00</b>	<b>100%</b>	<b>158.963.600,00</b>	<b>0</b>	

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	PAGU BELANJA LANGSUNG					
			SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		SELISIH (+/-)	LOKASI
			TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU (Rp.)	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU (Rp.)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>	<b>Prasarana Penunjang Aparatur (%)</b>						
4.404.33.02.22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	1 Paket	23.408.700,00	1 Paket	23.408.700,00	0	Kab. Malang
4.404.33.02.24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua yang dipelihara rutin dan berkala (Unit)	12 Unit	29.956.400,00	12 Unit	29.956.400,00	0	Kab. Malang
4.404.33.02.09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan ( jenis)	64 Unit	92.100.000,00	64 Unit	92.100.000,00	0	Kab. Malang
4.404.33.02.26	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	27 Unit	13.498.500,00	27 Unit	13.498.500,00	0	Kab. Malang
<b>4.404.33.03</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b>	<b>Persentase Penunjang Kerja Aparatur (%)</b>	<b>100%</b>	<b>20.400.000,00</b>	<b>100%</b>	<b>20.400.000,00</b>	<b>0</b>	
4.404.33.03.05	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Jumlah penyediaan Pakaian Olahraga/Batik (Stel)	34 Orang	20.400.000,00	34 Orang	20.400.000,00	0	Balitbangda
<b>4.404.33.05</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>	<b>Persentase Peningkatan Kapasitas Pegawai di Perangkat Daerah (%)</b>	<b>100%</b>	<b>58.745.000,00</b>	<b>100%</b>	<b>34.745.000,00</b>	<b>-24.000.000,00</b>	
4.404.33.05.01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Pegawai yang mengikuti pelatihan ( orang)	4 OHK	58.745.000,00	4 OHK	34.745.000,00	-24.000.000,00	Kab. Malang
<b>4.404.33.06</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>	<b>Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu (%)</b>	<b>100%</b>	<b>24.935.400,00</b>	<b>100%</b>	<b>24.935.400,00</b>	<b>0</b>	
4.404.33.06.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja (LKJ-IP/Profile Kinerja PD/Survei Kepuasan Masyarakat) (Buku)	22 Laporan	16.012.600,00	22 Laporan	16.012.600,00	0	Kab. Malang
4.404.33.06.02	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Jumlah dokumen laporan keuangan semester I dan semester II (Buku)	2 Dokumen	1.959.400,00	2 Dokumen	1.959.400,00	0	Kab. Malang
4.404.33.06.04	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir (Buku)	1 Dokumen	6.963.400,00	1 Dokumen	6.963.400,00	0	Kab. Malang
<b>4.404.33.07</b>	<b>PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BIDANG PEMBANGUNAN</b>	<b>Persentase hasil kegiatan kelitbang yang sesuai dengan strategi pembangunan Pemkab Malang</b>	<b>79%</b>	<b>368.023.000,00</b>	<b>79%</b>	<b>485.023.000,00</b>	<b>117.000.000,00</b>	
4.404.33.07.05	Kegiatan penelitian/kajian/studi/analisa dan terapan bidang Lingkungan Hidup	1. Jumlah Usulan Judul penelitian 2. Jumlah Dokumen Hasil Kajian Penelitian/Kajian/Studi/Analisa 3. Jumlah Dokumen Rekomendasi Hasil Penelitian dan Pengembangan 4.	1 Dokumen	96.112.000,00	1 Dokumen	96.112.000,00	0	Kab. Malang

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	PAGU BELANJA LANGSUNG					
			SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		SELISIH (+/-)	LOKASI
			TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU (Rp.)	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU (Rp.)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Jumlah Modul Terapan 5. Jumlah Naskah Jurnal Hasil Kegiatan						
4.404.33.07.06	Kegiatan penelitian/kajian/studi/analisa dan terapan bidang Teknologi Tepat Guna	1. Jumlah Usulan Judul penelitian 2. Jumlah Dokumen Hasil Kajian Penelitian/Kajian/Studi/Analisa 3. Jumlah Dokumen Rekomendasi Hasil Penelitian dan Pengembangan 4. Jumlah Modul Terapan 5. Jumlah Naskah Jurnal Hasil Kegiatan	1 dokumen	176.280.000,00	1 dokumen	293.280.000,00	117.000.000,00	Kab. Malang
4.404.33.07.33	Kegiatan penelitian/kajian/studi/analisa dan terapan bidang Pengembangan Kawasan	1. Jumlah Usulan Judul penelitian 2. Jumlah Dokumen Hasil Kajian Penelitian/Kajian/Studi/Analisa 3. Jumlah Dokumen Rekomendasi Hasil Penelitian dan Pengembangan 4. Jumlah Modul Terapan 5. Jumlah Naskah Jurnal Hasil Kegiatan	1 Dokumen	95.631.000,00	1 Dokumen	95.631.000,00	0	Kab. Malang
<b>4.404.33.10</b>	<b>PROGRAM PERUMUSAN, PENGOLAHAN DAN PENYUSUNAN INFORMASI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN</b>	<b>Prosentase Informasi Penelitian dan Pengembangan yang tersusun</b>	<b>46%</b>	<b>275.582.100,00</b>	<b>46%</b>	<b>353.582.100,00</b>	<b>78.000.000,00</b>	
4.404.33.10.01	Pengumpulan, Pengolahan dan Penyusunan Informasi Penelitian dan Pengembangan	Jumlah Dokumen Informasi Penelitian dan Pengembangan (Jurnal,	1 Dokumen	275.582.100,00	1 Dokumen	353.582.100,00	78.000.000,00	Kab. Malang
<b>4.404.33.11</b>	<b>PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BIDANG SOSIAL DAN KEMASYARAKATAN</b>	<b>Persentase hasil kegiatan kelitbang yang sesuai dengan strategi pembangunan Pemkab Malang</b>	<b>79%</b>	<b>359.000.000,00</b>	<b>79%</b>	<b>359.000.000,00</b>	<b>0</b>	
4.404.33.11.01	Kegiatan penelitian/kajian/studi/analisa dan terapan bidang Sosial Budaya	1. Jumlah Usulan Judul penelitian 2. Jumlah Dokumen Hasil Kajian Penelitian/Kajian/Studi/Analisa 3. Jumlah Modul Terapan 4. Jumlah Naskah Jurnal Hasil Kegiatan	1 dokumen	98.000.000,00	1 dokumen	98.000.000,00	0	Kab. Malang
4.404.33.11.02	Kegiatan penelitian/kajian/studi/analisa dan terapan bidang Sosial Politik	1. Jumlah Usulan Judul penelitian 2. Jumlah Dokumen Hasil Kajian Penelitian/Kajian/Studi/Analisa 3. Jumlah Modul Terapan 4. Jumlah Naskah Jurnal Hasil Kegiatan	1 dokumen	93.000.000,00	1 dokumen	93.000.000,00	0	Kab. Malang
4.404.33.11.03	Kegiatan penelitian/kajian/studi/analisa dan terapan bidang Kemasyarakatan	1. Jumlah Usulan Judul penelitian 2. Jumlah Dokumen Hasil Kajian Penelitian/Kajian/Studi/Analisa 3.	1 dokumen	168.000.000,00	1 dokumen	168.000.000,00	0	Kab. Malang

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	PAGU BELANJA LANGSUNG					
			SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		SELISIH (+/-)	LOKASI
			TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU (Rp.)	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU (Rp.)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Jumlah Modul Terapan 4. Jumlah Naskah Jurnal Hasil Kegiatan						
<b>4.404.33.12</b>	<b>PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BIDANG EKONOMI, INVESTASI DAN KEUANGAN</b>	<b>Persentase hasil kegiatan kelitbangan yang sesuai dengan strategi pembangunan Pemkab Malang</b>	<b>79%</b>	<b>497.500.000,00</b>	<b>79%</b>	<b>501.870.000,00</b>	<b>4.370.000,00</b>	
4.404.33.12.01	Kegiatan penelitian/kajian/studi/analisa dan terapan bidang Ekonomi	1. Jumlah Usulan Judul penelitian 2. Jumlah Dokumen Hasil Kajian Penelitian/Kajian/Studi/Analisa 3. Jumlah Modul Terapan 4. Jumlah Naskah Jurnal Hasil Kegiatan	1 dokumen	98.000.000,00	1 dokumen	98.970.000,00	970.000,00	Kab. Malang
4.404.33.12.02	Kegiatan penelitian/kajian/studi/analisa dan terapan bidang keuangan	1. Jumlah Usulan Judul penelitian 2. Jumlah Dokumen Hasil Kajian Penelitian/Kajian/Studi/Analisa 3. Jumlah Modul Terapan 4. Jumlah Naskah Jurnal Hasil Kegiatan	1 dokumen	299.500.000,00	1 dokumen	302.900.000,00	3.400.000,00	Kab. Malang
4.404.33.12.03	Kegiatan penelitian/kajian/studi/analisa dan terapan bidang investasi	1. Jumlah Usulan Judul penelitian 2. Jumlah Dokumen Hasil Kajian Penelitian/Kajian/Studi/Analisa 3. Jumlah Modul Terapan 4. Jumlah Naskah Jurnal Hasil Kegiatan	1 dokumen	100.000.000,00	1 dokumen	100.000.000,00	0	Kab. Malang
<b>4.404.33.13</b>	<b>PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BIDANG PEMERINTAHAN</b>	<b>Persentase hasil kegiatan kelitbangan yang sesuai dengan strategi pembangunan Pemkab Malang</b>	<b>79%</b>	<b>459.500.000,00</b>	<b>79%</b>	<b>459.500.000,00</b>	<b>0</b>	
4.404.33.13.01	Kegiatan penelitian/kajian/studi/analisa dan terapan bidang pemerintahan umum dan desa	1. Jumlah Usulan Judul penelitian 2. Jumlah Dokumen Hasil Kajian Penelitian/Kajian/Studi/Analisa 3. Jumlah Modul Terapan 4. Jumlah Naskah Jurnal Hasil Kegiatan	1 dokumen	170.000.000,00	1 dokumen	170.000.000,00	0	Kab. Malang
4.404.33.13.02	Kegiatan penelitian/kajian/studi/analisa dan terapan bidang aparatur pemerintah dan pelayanan publik	1. Jumlah Usulan Judul penelitian 2. Jumlah Dokumen Hasil Kajian Penelitian/Kajian/Studi/Analisa 3. Jumlah Modul Terapan 4. Jumlah Naskah Jurnal Hasil Kegiatan	1 dokumen	184.500.000,00	1 dokumen	184.500.000,00	0	Kab. Malang
4.404.33.13.03	Kegiatan penelitian/kajian/studi/analisa dan terapan bidang otonomi daerah dan kerjasama	1. Jumlah Usulan Judul penelitian 2. Jumlah Dokumen Hasil Kajian Penelitian/Kajian/Studi/Analisa 3. Jumlah Modul Terapan 4. Jumlah Naskah Jurnal Hasil Kegiatan	1 dokumen	105.000.000,00	1 dokumen	105.000.000,00	0	Kab. Malang

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	PAGU BELANJA LANGSUNG					
			SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		SELISIH (+/-)	LOKASI
			TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU (Rp.)	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU (Rp.)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.404.33.14	PROGRAM PENINGKATAN INOVASI DAERAH	Persentase Program/Kegiatan Inovasi Daerah	79%	109.891.000,00	79%	146.754.000,00	36.863.000,00	
4.404.33.14.01	Penyusunan Dokumen Roadmap SIDa (Sistem Inovasi Daerah)	Jumlah Dokumen Roadmap SIDa yang tersusun	1 dokumen	109.891.000,00	1 dokumen	146.754.000,00	36.863.000,00	Kab. Malang

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Rencana Kerja menjadi bagian yang sangat penting artinya untuk mengaplikasikan berbagai persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab Pemerintah dalam upaya mengakomodir berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedepankan pembangunan berbasis pada masyarakat (*Community Base Development*) dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku (*stakeholders*) dalam menciptakan *Good Governance* sesuai dengan tuntutan paradigma baru, yang pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijaksanaan yang dampaknya merembes kebawah (*trickle down effect*), sehingga keberpihakan pada masyarakat kecil benar-benar dikedepankan.

*Output* Rencana Kerja Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Malang adalah Program TahunanBadan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Malang sesuai dengan tugas dan fungsi serta sasaran Program Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Malang.

Rencana Kerja Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Malang selain menjadi pedoman pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2019, berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Malang, Sebagai bahan pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2019, serta dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun bagi seluruh jajaran Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Malang. Rencana Kerja juga dapat memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan manajemen dan seluruh staf Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Malang, sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik dimasa datang.

Demikian untuk dilaksanakan.

**Plt.BUPATI MALANG,**

**SANUSI**